
Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Terjadinya Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah (Studi pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi)

Dini Eka Permatasari

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
permatasaridini45@yahoo.com

Taufik Kurrohman

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember
taufik.feb@unej.ac.id

Kartika

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Abstract

This study aims to investigate perceptions of financial officers regarding the effectiveness of internal control systems, compensation allegiance, organizational culture, unethical behavior, leadership style, law enforcement, and information asymmetry against fraud incidents in the governmental sector. This research is using purposive sampling method. Data are collected by questionnaires. Respondents of this study are 32 financial officers in the Government of Banyuwangi Regency. Hypotheses are tested by using multiple linier regression. The result shows that there is no effect of effectiveness of internal control system, compensation and information asymmetry to fraud on the financial officers of the Government of Banyuwangi Regency. Organizational culture, leadership style, and law enforcement have negative effect on fraud on financial officers of Banyuwangi Regency Government. Unethical behavior has positive effect on the tendency of fraud on the financial officers of the Government of Banyuwangi Regency.

Keywords: Government, Fraud, Pressure, Rationalization

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi pegawai keuangan mengenai pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis, gaya kepemimpinan, penegakan hukum, dan asimetri informasi terhadap kecenderungan terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive sampling. Pengumpulan data dengan menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 32 pegawai keuangan di Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Data dianalisis dengan menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh keefektifan sistem pengendalian internal, kesesuaian kompensasi dan asimetri informasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kultur organisasi, gaya kepemimpinan, dan penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Kata Kunci: Pemerintah, Kecurangan (*Fraud*), Tekanan, Peluang, Rasionalitas.

1. Pendahuluan

Rencana perusahaan didirikan adalah bertujuan untuk meKecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang menyimpang dari norma-norma yang dapat dilakukan oleh individu atau beberapa orang dengan niatan untuk menipu dan menyebabkan pihak lain mengalami kerugian. Di Indonesia kecurangan sudah banyak terjadi di beberapa lini organisasi baik dilakukan oleh manajemen puncak hingga ke jajaran pelaksana. Menurut Sukanto (2009), kecurangan merupakan penipuan yang sengaja dilakukan sehingga menimbulkan kerugian pada pihak lain dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan atau kelompoknya. Kecurangan memberikan penyajian yang salah yang secara sengaja dibuat tanpa perhitungan dan tanpa dapat dipercaya kebenarannya. Kecurangan dapat dilakukan oleh individu atau beberapa kelompok.

Umumnya kecurangan akuntansi berkaitan dengan korupsi. Korupsi merupakan kasus kecurangan yang sering ditemukan di sektor pemerintahan. Tindakan yang lazim dilakukan diantaranya adalah memanipulasi pencatatan, penghilangan dokumen dan *mark up* yang merugikan perekonomian negara. Selain itu menurut *Association of Certified Fraoud Examiners* (ACFE) selain korupsi dua jenis kecurangan lainnya adalah *fraud* terhadap aset dan *fraud* terhadap laporan keuangan. Namun yang sering dilakukan oleh kebanyakan instansi pemerintah adalah jenis korupsi. *Fraud* yang terjadi di sektor pemerintahan, merupakan sesuatu yang serius sebab sumber daya yang terbatas tidak digunakan untuk pelayanan bagi masyarakat atau konstituen, hal ini tentunya dapat berdampak pada kehilangan kepercayaan terutama terkait kemampuan kepemimpinan instansi pemerintahan (Ziegenfuss, 1999 dalam Adinda, 2015). Menurut data *In-*

donesia Corruption Watch (ICW) (2015), jumlah kasus korupsi cenderung menurun selama 2010-2012, tetapi kembali meningkat pada 2013-2014. Pada 2010, jumlah kasus korupsi yang disidik kejaksaan, kepolisian, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencapai 448 kasus. Pada 2011, jumlahnya menurun menjadi 436 kasus dan menurun lagi pada 2012 menjadi 402 kasus. Namun, pada 2013, jumlahnya naik signifikan menjadi 560 kasus. Pada 2014, jumlah kasus korupsi diperkirakan akan meningkat lagi mengingat selama semester I-2014 jumlahnya sudah mencapai 308 kasus. Hal ini membuktikan bahwa gerakan anti korupsi yang selama ini sebagai bentuk konkret dukungan terhadap kampanye pencegahan korupsi yang dilakukan GOPAC (*Global Parliamentarians for Against Corruption*) belum benar-benar terlaksana dengan baik. Dari kasus-kasus korupsi yang terjadi selama semester I-2014, sebagian besar tersangka adalah pejabat/pegawai pemerintah daerah dan kementerian, yakni 42,6 persen. Tersangka lain merupakan direktur/komisaris perusahaan swasta, anggota DPR/DPRD, kepala dinas, dan kepala daerah (Kompas.com: Selasa, 19 Agustus 2014 dalam Adinda, 2015).

Indonesian Corruption Watch (ICW) melakukan pemantauan terhadap Penanganan Kasus Korupsi tahun 2015, menyatakan bahwa Kerugian Negara akibat kasus korupsi mencapai Rp 3,1 triliun. Dari jumlah kerugian tersebut, sebesar Rp 1,2 triliun didapat pada semester pertama tahun 2015. Sedangkan pada semester kedua tahun 2015 mencapai Rp 1,8 triliun. Jawa Timur sendiri merupakan provinsi dengan jumlah kasus korupsi terbanyak di tahun 2015 yang dipantau oleh ICW. Pada Provinsi Jawa Timur, terdapat sejumlah 54 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 332,3 miliar dan nilai suap sebesar Rp 2,4 miliar (Kompas.com: 24 Februari 2016). Sedangkan hasil pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* pada semester satu tahun 2016, terhitung mulai 1 Januari hingga 30 Juni 2016 di Provinsi Jawa Timur sebanyak 19 kasus dengan kerugian mencapai Rp 223,5 miliar. Begitu banyak korupsi kasus korupsi di Jawa Timur menandakan bahwa masih lemahnya pengawasan dalam kegiatan pemerintahan.

Banyuwangi merupakan salah satu daerah otonom di Jawa Timur yang terus bertransformasi menjadi wilayah yang berkembang dan mandiri baik dari segi pembangunan maupun perekonomiannya. Hal ini dibuktikan dari semakin meningkatnya perencanaan pembangunan di berbagai daerah yang menandakan akuntabilitas pengelolaan keuangan di Banyuwangi juga semakin meningkat dan memenuhi prinsip akuntabel, partisipatif dan transparan. Salah satu indikator kemajuan perekonomian Banyuwangi adalah diraihnya penghargaan Government Award 2016 sebagai daerah dengan pertumbuhan ekonomi terbaik. Pertumbuhan ekonomi di banyuwangi terus melejit karena seluruh sektor perekonomian daerah bergerak bersama-sama mulai dari pertanian, perikanan, UMKM, sektor barang dan jasa hingga pariwisata. (sumber: merdeka, 2016). Pada saat ini, perkembangan perekonomian di Banyuwangi menjadi pusat perhatian. Hal ini didukung oleh laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Pada tahun 2014 APBD Bayuwangi sebesar

Rp 149.993.902.662,25. Selanjutnya pada tahun 2015 APBD Banyuwangi sebesar Rp 177.884.161.028,00 dan tahun terakhir yaitu pada tahun 2016 APBD Banyuwangi sebesar Rp 297.531.160.106,00. Meningkatnya APBD Banyuwangi dari tahun ke tahun ini menunjukkan bahwa semakin meningkatnya perekonomian Banyuwangi. Adanya peningkatan perekonomian Banyuwangi tidak menutup kemungkinan terjadinya kecurangan (*fraud*). Penelitian kali ini menggunakan teori *Fraud Triangle* yang dikembangkan oleh Cressey (1953), mengatakan bahwa kecurangan disebabkan oleh tiga faktor, yang terdiri dari tekanan (*Pressure*), peluang (*Opportunity*), dan rasionalitas (*Rationalization*). Penelitian ini dilakukan dengan menggali persepsi para pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang terdapat dalam penelitian ini terdiri gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, kultur organisasi dan perilaku tidak etis.

Oleh sebab itu hal yang mendasari penelitian ini adalah karena banyaknya kasus kecurangan yang terjadi di Kabupaten Banyuwangi yang masih belum teratasi hingga saat ini yang dapat merugikan keuangan negara/daerah. Berdasarkan penelitian terdahulu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan di sektor pemerintahan, maka penelitian di lakukan dengan menggali persepsi pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sehingga penelitian ini dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu dengan objek yang berbeda.

2. Kajian Teoritis dan Pengembangan Hiptotesis

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Peluang Terjadinya Kecurangan (*Fraud*) pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Menurut COSO (2004) dalam Pramudita (2013) mengatakan bahwa lingkungan yang etis dari suatu organisasi dibangun dari berbagai aspek mulai dari gaya top manajemen dalam mencapai sasaran organisasi, nilai-nilai yang mereka yakini. Diargumentasikan bahwa di suatu lingkungan yang lebih etis, karyawan akan cenderung untuk mengikuti dan menerima peraturan perusahaan. Lingkungan etis yang dibentuk oleh gaya kepemimpinan yang baik, dan pada akhirnya akan berpengaruh terhadap penurunan peluang terjadinya kecurangan oleh karyawan. Untuk membentuk suatu lingkungan etis yang jauh dari tindakan *fraud* diperlukan sosok seorang figur pemimpin yang baik di mata karyawan. Jika seorang karyawan mempunyai persepsi yang buruk terhadap gaya kepemimpinan pemimpinnya, maka karyawan tersebut akan cenderung melakukan hal-hal yang akan merugikan perusahaan. Dapat disimpulkan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin baik gaya kepemimpinan yang melekat pada seorang pemimpin dalam perusahaan akan menurunkan tingkat terjadinya *fraud* yang dilakukan oleh karyawannya. Dari penjelasan tersebut, maka dihipotesiskan:

H₁: Gaya Kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada

pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Kompensasi berperan dalam meningkatkan motivasi karyawan untuk bekerja lebih efektif dan produktif, sebab kompensasi adalah alat untuk memenuhi berbagai kebutuhan karyawan. Kompensasi merupakan salah satu motivasi penting yang ikut mendorong karyawan untuk berprestasi, sehingga tinggi rendahnya kompensasi yang diberikan akan mempengaruhi kinerja dan kesetiaan karyawan. Beberapa tujuan kompensasi, yaitu: menjalin ikatan kerja antara majikan dengan karyawan, kepuasan kerja (balas jasa), motivasi, disiplin, dan stabilitas karyawan. Dalam penelitian Zulkarnain (2013) ditunjukkan bahwa terdapat pengaruh negatif antara kesesuaian kompensasi terhadap *fraud* di sektor pemerintahan. Artinya semakin tinggi jumlah kompensasi yang diberikan oleh prinsipal, maka semakin kecil kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Adanya pemberian kompensasi yang sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan pegawai diharapkan dapat membuat pegawai merasa tercukupi sehingga akan meningkatkan kinerja pegawai dan mengurangi tindakan kecurangan (*fraud*). Apabila seorang pegawai merasa kompensasi yang diterima tidak sesuai dengan apa yang telah dikerjakan untuk perusahaan/instansi maka akan mendorong seorang pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*) demi mendapatkan keuntungan (Cassey dalam Mustikasari, 2013). Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah:

H₂: Kesesuaian kompensasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang efektif merupakan komponen penting dalam manajemen dinas pemerintahan dan menjadi dasar bagi kegiatan operasional yang sehat dan aman. Sistem Pengendalian Intern yang efektif dapat membantu pemerintah dalam menjaga aset, menjamin tersedianya pelaporan keuangan dan manajerial yang dapat dipercaya, meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mengurangi risiko terjadinya kerugian, penyimpangan dan pelanggaran aspek ke hati-hatian. Menurut PP Nomer 60 Tahun 2008, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan pelaporan ekuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Penelitian Najahningrum (2013), Pramudita (2013), Zulkarnain (2013) juga menunjukkan hasil penelitian bahwa terdapat pengaruh negatif antara keefek-

tifan pengendalian internal dengan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Artinya semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian internal disuatu organisasi, semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi, sebaliknya semakin rendah efektivitas sistem pengendalian internal maka hal itu akan menjadi kesempatan bagi karyawan untuk melakukan *fraud* pada suatu organisasi tersebut. Sistem pengendalian internal Pemerintahan yang kurang baik akan memberikan kesempatan bagi pegawai untuk melakukan kecurangan (*fraud*), hal tersebut sesuai dengan teori *Fraud Triangle* yang menjelaskan bahwa salah satu faktor yang dapat meningkatkan peluang/kesempatan bagi individu melakukan kecurangan (*fraud*) adalah sistem pengendalian internal yang lemah. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H₃: Keefektifan Sistem Pengendalian Internal berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Penegakan hukum merupakan tindakan yang nyata oleh subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati hukum yang ada di suatu negara. Penegakan hukum yang kurang efektif akan membuka peluang bagi pegawai dalam suatu organisasi atau instansi pemerintahan untuk melakukan pelanggaran berupa kecurangan. Mustikasari (2013) dalam penelitiannya menjelaskan bahwa penegakan peraturan berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) artinya semakin tinggi persepsi pegawai mengenai penegakan hukum/ peraturan di suatu pemerintahan, maka dapat mengurangi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah:

H₄: Penegakan Hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Asimetri informasi merupakan keadaan dimana terjadi ketidak seimbangan informasi yang diperoleh oleh prinsipal dan agen. Kondisi tersebut membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan kecurangan dengan menyajikan informasi keuangan yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Tujuannya semata-mata karena ingin mendapatkan penilaian yang baik atas kinerja yang telah dilakukan dengan memanipulasi informasi keuangan. Penelitian yang dilakukan Najahningrum *et al.* (2013) dan Chandra *et al.* (2015) dalam Mustika *et al.* (2016) menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan. Artinya semakin tinggi asimetri yang terjadi antara pihak pengelola dan pihak pengguna laporan keuangan,

kecenderungan terjadinya tindak kecurangan (*fraud*) akan semakin tinggi. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah:

H₅: Asimetri Informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Kultur Organisasi terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Kultur organisasi dapat dijadikan sebagai penentu arah dalam setiap tindakan, bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya organisasi dan sebagai alat untuk menghadapi masalah dan peluang dari lingkungan internal dan eksternal. Dalam penelitian yang dilakukan Sulistyowati (2007), mengatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak pidana korupsi. Kultur organisasi yang baik, tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pelaku organisasi mempunyai *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identify* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi). Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah:

H₆: Kultur Organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Pengaruh Perilaku Tidak Etis terhadap kecenderungan kecurangan (*Fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Perilaku tidak etis merupakan sesuatu yang sulit untuk dimengerti, yang jawabannya tergantung pada interaksi yang kompleks antara situasi serta karakteristik pribadi pelakunya. Perilaku yang dapat dikatakan tidak etis dapat dilihat seperti penyalahgunaan kekuasaan/posisi, penyalahgunaan wewenang/tugas serta penyalahgunaan sumber daya organisasi. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mustika, Hastuti dan Heriningsih (2016) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif secara signifikan terhadap kecenderungan kecurangan akuntansi. Artinya semakin tinggi perilaku tidak etis maka semakin tinggi kemungkinan terjadinya kecurangan akuntansi. Dari penjelasan tersebut, maka hipotesis yang diformulasikan adalah:

H₇: Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

3. Metode Penelitian Data dan Sampel

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kuantitatif dan penelitian ini dilakukan secara langsung dengan survei langsung dengan responden. Populasi dalam pe-

nelitian ini adalah seluruh pegawai keuangan SKPD di Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Pemilihan sampel menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan beberapa kriteria pegawai keuangan minimal bekerja selama 5 tahun dan yang menjabat sebagai Kepala Bagian Keuangan, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara.

Operasional Variabel

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintah yang diukur dengan persepsi pegawai keuangan instansi pemerintahan mengenai kecurangan yang sering terjadi di sektor pemerintah. Variabel independen adalah variabel yang dapat mempengaruhi perubahan dalam variabel dependen yang mempunyai pengaruh positif ataupun negatif bagi variabel independen lainnya. Variabel independen dalam penelitian ini adalah gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, kultur organisasi, dan perilaku tidak etis.

Analisa Data

Analisis data dalam penelitian ini dengan menggunakan alat statistik regresi linier berganda (*Multiple Linier Regretion*) dengan bantuan *software* statistik SPSS. Berikut persamaan penelitian yang di gunakan :

$$\text{Fraud} = \alpha + \beta_1 \text{ Gaya Kepimpinan} + \beta_2 \text{ Kompensasi} + \beta_3 \text{ SPI} + \beta_4 \text{ Penegakan Hukum} + \beta_5 \text{ Asimetri} + \beta_6 \text{ Kultur} + \beta_7 \text{ Etis} + \varepsilon$$

Sumber: Priyanto (2010)

4. Hasil dan Pembahasan Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa semua pertanyaan dalam kuesioner sudah memenuhi uji validitas karena *Pearson Correlation* menunjukkan >0,5 dan nilai signifikansi <0,05. Dapat disimpulkan bahwa semua *item* pertanyaan variabel gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, kultur organisasi, dan perilaku tidak etis dan *fraud* dinyatakan *valid*. Hasil uji reliabilitas menunjukkan nilai *Cronbach's Alpha* seluruh variabel >0,6. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua variabel dalam penelitian ini adalah reliabel.

Uji Normalitas

Dapat diketahui bahwa variabel *fraud*, gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, kultur organisasi, dan perilaku tidak etis memiliki nilai Kolmogorov Smirnov lebih besar dari 0,05. Sehingga, dapat dinyatakan bahwa data variabel dalam penelitian ini berdistribusi normal.

Uji Multikolinieritas

Berdasarkan hasil analisis *Collinearity Statistics*

Tabel 1. Hasil Uji Kolmogorov Smirnov Test

Variabel	Nilai Kolmogorov Smirnov	Keterangan
Gaya Kepimpinan (X1)	0,109	Berdistribusi Normal
Kesesuaian Kompensasi (X2)	0,121	Berdistribusi Normal
Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (X3)	0,102	Berdistribusi Normal
Penegakan Hukum (X4)	0,123	Berdistribusi Normal
Asimetri Informasi (X5)	0,192	Berdistribusi Normal
Kultur Organisasi (X6)	0,068	Berdistribusi Normal
Perilaku Tidak Etis (X7)	0,096	Berdistribusi Normal
Fraud (Y)	0,064	Berdistribusi Normal

Sumber : Data primer diolah (2017)

diketahui bahwa model tidak terjadi multikolinieritas. Hal tersebut ditandai dengan nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF dari masing-masing variabel kurang dari 10. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas atau korelasi antar variabel independen dalam penelitian ini.

Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas dalam penelitian ini menggunakan Uji *Glesjer*. Model regresi dapat dikatakan bebas dari heteroskedastisitas jika probabilitas dari hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas dan sebaliknya jika probabilitas dari hasil korelasi lebih besar. Hasil yang didapatkan pada uji *Glesjer* bahwa variabel independen pada penelitian ini lebih dari 0,05.

Koefisien Determinasi dan F Statistik

Berdasarkan Tabel 4.2 menunjukkan model pertama memiliki nilai Adjusted R Square sebesar 0,702 atau 70,2%. Hal ini berarti variabel terikat (*Kecurangan*) dipengaruhi oleh variabel bebas (gaya kepemimpinan, kesesuaian kompensasi, keefektifan sistem pengendalian internal, penegakan hukum, asimetri informasi, kultur organisasi, perilaku tidak etis) sebesar 70,2%. Nilai tersebut menunjukkan bahwa secara keseluruhan variabel bebas mempengaruhi 70,2% variabel terikat sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain diluar model.

Hasil Pengujian Hipotesis

$$Y = 0,220 - 0,321X1 + 0,058X2 - 0,119X3 - 0,329X4 + 0,423X5 - 0,586X6 + 0,610X7 + e$$

Keterangan:

- Y = Fraud
- α = Konstanta
- β = Koefisien Regresi
- X1 = Gaya Kepemimpinan
- X2 = Kesesuaian Kompensasi
- X3 = Keefektifan Sistem Pengendalian Internal
- X4 = Penegakan Hukum
- X5 = Asimetri Informasi
- X6 = Kultur Organisasi

X7 = Perilaku Tidak Etis

e = Kesalahan regresi (error)

Pembahasan

Pengaruh Gaya Kepemimpinan Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis pertama (H1) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 2,346 lebih besar dari t tabel (1,711). Sehingga gaya kepemimpinan dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₁ diterima). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013); Pramudita (2013) yang menyatakan bahwa gaya kepemimpinan berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Hal tersebut menunjukkan bahwa gaya kepemimpinan yang terdapat pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori baik. Dimana dalam instansi tersebut telah memiliki hubungan yang baik antara pemimpin dengan bawahan, dimana atasan menempatkan bawahan sesuai latar belakang pendidikannya, sehingga dalam menjelaskan tugasnya dapat berjalan dengan baik. Selain itu, pemimpin telah menjelaskan dengan baik penyampaian tugas terhadap bawahan sehingga proses komunikasi yang terjalin antara atasan dan bawahan berjalan secara lancar. Karena proses komunikasi yang berjalan secara lancar itu juga akan memberikan pengaruh terhadap pemikiran dan tindakan yang dilakukan bawahan dalam suatu instansi atau perusahaan.

Pengaruh Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Tabel 2. F Statistik dan Koefisien Determinasi

R	R square	Adjusted R Square	F Sig.
0,877	0,770	0,702	0,000

Sumber : Data primer diolah (2017)

Tabel 3. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Variabel	Koefisien Regresi		Sig.	Keterangan
Konstanta	0,220	1495	-	-
Gaya Kepemimpinan (X1)	-0,321	-2,346	0,028	H1 Diterima
Kesesuaian Kompensasi (X2)	0,058	-0,561	0,580	H2 Ditolak
Keefektifan Sistem Pengendalian Internal (X3)	-0,119	-0,962	0,346	H3 Ditolak
Penegakan Hukum (X4)	-0,329	-2,344	0,028	H4 Diterima
Asimetri Informasi (X5)	0,423	2,917	0,008	H5 Diterima
Kultur Organisasi (X6)	-0,586	-3,482	0,002	H6 Diterima
Perilaku Tidak Etis (X7)	0,610	3,737	0,001	H7 Ditolak

Sumber : Data primer diolah (2017)

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kedua (H2) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa Kesesuaian Kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,580 lebih besar dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 0,561 lebih kecil dari t tabel (1,711). Sehingga kesesuaian kompensasi tidak dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₂ ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013); Pramudita (2013). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa kesesuaian kompensasi memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Artinya semakin baik kesesuaian kompensasi yang diberikan maka semakin rendah kemungkinan kecurangan yang terjadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2008); Adinda (2015); Mustika dkk (2016); Kurrohman dkk (2017) yang menyatakan bahwa kesesuaian kompensasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Kesesuaian kompensasi pada pegawai keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori sesuai. Berdasarkan pengalaman dilapangan, kecurangan tidak selalu terjadi karena faktor kompensasi yang dianggap kurang sesuai.

Hal ini dikarenakan menurut responden, kompensasi berupa gaji dan honor serta kenaikan jabatan atau promosi merupakan hal yang tidak dapat dipilih oleh para pegawai karena gaji dan kompensasi yang diberikan telah disesuaikan dengan jabatan dan golongan responden. Dengan kata lain, responden mengetahui kapan akan diberikan kompensasi sesuai dengan periode kenaikan pangkat/jabatan yang terjadi dalam instansi tersebut.

Pengaruh Keefektifan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketiga (H3) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa keefektifan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,346 lebih besar dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 0,962 lebih kecil dari t tabel (1,711).

Sehingga keefektifan pengendalian internal tidak dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₃ ditolak). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015); Zulkarnain (2013); Pramudita (2013). Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Artinya semakin tinggi efektivitas sistem pengendalian internal disuatu instansi, maka akan semakin rendah kecenderungan kecurangan akuntansi (*fraud*). Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Wilopo (2008); Kurrohman dkk (2017) yang menyatakan bahwa keefektifan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh di sektor pemerintahan. Hasil penelitian ini tidak mendukung dari Teori *Fraud Triangle* dimana semakin tinggi persepsi pegawai tentang keefektifan sistem pengendalian internal dalam suatu instansi maka akan mengurangi kecenderungan kecurangan (*fraud*).

Hal ini disebabkan karena dalam persepsi pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi baik tidaknya sistem pengendalian internal tidak mempengaruhi kecenderungan seseorang melakukan kecurangan (*fraud*) hal ini dikarenakan tindakan kecurangan yang dilakukan bisa saja dilakukan diluar sistem pengendalian yang seharusnya dan direncanakan sedekimian rupa dengan melakukan kesepakatan tertentu yang tidak sesuai dengan ketentuan/prosedur sehingga adanya sistem pengendalian internal yang baik tidak lagi menjadi halangan untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Penegakan Hukum Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keempat (H4) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,028 lebih kecil dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 2,344 lebih besar dari t tabel (1,711). Sehingga penegakan hukum dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₄ diterima). Hasil penelitian tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Najahningrum (2013); Mustikasari (2013) yang men-

yatakan bahwa bahwa penegakan hukum berpengaruh negatif terhadap kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Berdasarkan hasil analisis deskriptif, penegakan hukum pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi tergolong baik dan dapat mengurangi atau bahkan menutup peluang untuk melakukan kecurangan.

Dalam teori *Fraud Triangle* menyatakan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kecurangan (*fraud*), salah satu diantaranya adalah kesempatan (*opportunity*). Apabila penegakan hukum/peraturan di instansi tidak tegas maka akan membuka peluang bagi pegawai untuk melakukan tindak kecurangan, sebaliknya apabila penegakan hukum/peraturan di instansi tegas dan jelas maka tidak ada kesempatan bagi para pegawai untuk melakukan tindakan kecurangan (*fraud*). Hasil penelitian ini mendukung teori *Fraud Triangle* dimana pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mematuhi peraturan hukum sehingga semakin tinggi persepsi pegawai tentang penegakan hukum/peraturan dalam suatu instansi maka akan mengurangi adanya tindak kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis kelima (H5) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,008 kurang dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 2,917 lebih besar dari t tabel (1,711). Sehingga asimetri informasi dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₅ diterima).

Hasil ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Mustika (2016) dan Najahingrum (2013) di sektor pemerintahan yang menunjukkan bahwa semakin tinggi asimetri informasi, semakin tinggi pula kecenderungan kecurangan (*fraud*). Dalam penelitian ini pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang mengetahui dan memahami isi dan angka laporan keuangan serta mengetahui seluruh informasi yang berkaitan dengan transaksi keuangan instansi memiliki kecenderungan untuk tidak menshare informasi yang ada secara transparan dan akuntabel. Alasan yang sering dikemukakan adalah informasi keuangan secara terinci bersifat rahasia sehingga, perilaku ini membuat mereka memiliki peluang untuk melakukan kecurangan (*fraud*).

Pengaruh Kultur Organisasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis keenam (H6) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa bahwa kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pega-

wai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 3,482 lebih besar dari t tabel (1,711). Sehingga kultur organisasi dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₆ diterima). Penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Adinda (2015); Zulkarnain (2013) yang menyatakan bahwa kultur organisasi tidak berpengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistyowati (2007) yang menyatakan bahwa kultur organisasi berpengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan.

Kultur Organisasi pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi termasuk dalam kategori cukup baik. Hal tersebut dapat dilihat dari para pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah mencapai integrasi atau kesatuan pandangan sehingga mewujudkan budaya organisasi yang etis. Kultur organisasi yang baik tidak akan membuka peluang sedikitpun bagi individu untuk melakukan korupsi, karena kultur organisasi yang baik akan membentuk para pegawai instansi memiliki *sense of belonging* (rasa ikut memiliki) dan *sense of identify* (rasa bangga sebagai bagian dari suatu organisasi) (Arifin, 2009), sehingga hipotesis mengenai kultur organisasi ini diterima.

Pengaruh Perilaku Tidak Etis Terhadap Kecenderungan Kecurangan (*Fraud*) di Sektor Pemerintah pada Pegawai Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

Hasil analisis regresi linier berganda pada Uji t terhadap hipotesis ketujuh (H7) dapat dilihat pada tabel 3 bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dengan melihat taraf signifikansinya yaitu sebesar 0,001 lebih kecil dari 0,05 dan uji-t menunjukkan nilai sebesar 3,737 lebih besar dari t tabel (1,711). Sehingga perilaku tidak etis dapat menekan adanya kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi (H₇ diterima). Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zulkarnain (2013); Mustika dkk (2016) yang menyatakan bahwa Perilaku Tidak Etis berpengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan. Moralitas merupakan suatu hal yang mempengaruhi tindakan dan perilaku seorang individu. Moralitas yang buruk akan membuat individu cenderung berperilaku tidak etis. Dalam suatu instansi, yang diwakili manajemennya, moralitas manajemen merupakan hal penting yang dapat mempengaruhi tindakan yang diambil oleh setiap pegawai dalam suatu instansi. Hasil penelitian pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, moralitas manajemen memiliki pengaruh terhadap perilaku tidak etis dimana moralitas manajemen pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dikatakan kurang baik seperti menggunakan sumber daya instansi (kendaraan dinas, peralatan kantor) untuk kepentingan pribadi. Hal tersebut disebabkan karena pegawai instan-

si memiliki moral hazard yang baik. Dimana moral hazard yang dimiliki oleh pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, meskipun mereka mengetahui peluang adanya kecurangan mereka tidak akan melakukan kecurangan tersebut.

5. Kesimpulan, Keterbatasan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di sektor pemerintah pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dapat diambil kesimpulan bahwa pada keefektifan sistem pengendalian, dan kesesuaian kompensasi tidak memiliki pengaruh terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Gaya kepemimpinan, kultur organisasi, dan penegakan hukum memiliki pengaruh negatif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk asimetri informasi dan perilaku tidak etis memiliki pengaruh positif terhadap kecenderungan kecurangan (*fraud*) pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Keterbatasan

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan di di sektor pemerintah pada pegawai keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi terdapat beberapa keterbatasan, yaitu penelitian ini, hanya menggunakan sampel pada bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, sehingga hanya memperoleh sampel yang sedikit serta kuesioner tidak ditunggu oleh peneliti, sehingga kuesioner bisa saja dikerjakan oleh orang yang sama.

Saran

Berdasarkan keterbatasan yang telah dijelaskan, saran yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya menambah sampel diluar bagian keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
2. Diharapkan bagi peneliti selanjutnya untuk menunggu dalam penyebaran dan pengisian kuesioner.

REFERENSI

- Adinda, Yanita Maya. (2015). Faktor yang mempengaruhi terjadinya kecurangan (*fraud*) di sektor pemerintahan Kabupaten Klaten. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Andriansyah, M. (2016). *Pertumbuhan ekonomi terbaik, Banyuwangi raih goverment award*. <https://m.merdeka.com/amp/peristiwa/pertumbuhan-ekonomi-terbaik-banyuwangi-raih-goverment-award-2016.html>. [Diakses pada 8 Oktober 2017]
- Cressey, Donald R. (1953). *Other people's money*. Pater-son Smith. Montclair.
- Fanani, Ardian. (2016). *Mantan pejabat Pemkab Banyuwangi ditahan terkait kasus korupsi bedah rumah*. <https://m.detik.com/news/berita-ja-wa-timur/3255960/mantan-pejabat-pemkab-banyuwangi-ditahan-terkait-kasus-korupsi-bedah-rumah>. [Diakses pada 24 September 2017].
- Indonesia Corruption Watch (ICW). (2014). *Jumlah Kasus Korupsi*. ICW, Jakarta.
- Kompas Forum. (2014). *PNS dominasi tersangka korupsi*. <http://forum.kompas.com/nasional/65351-pns-dominasi-tersangka-korupsi.html> (Diakses tanggal 19 September 2017, pukul 20.00).
- Kurrohman, Lailiyah, Wahyuni. (2017). Determinant of fraudulent of government: an analysis in Situbondo Regency, East Java, *International Journal of Economics and Management* 11 (S1) : 133 – 140.
- Mustika, Dian, dkk. (2016). *Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud); persepsi pegawai dinas Kabupaten Way Kanan Lampung*. Prosiding. Simposium Nasional Akuntansi XIX. Lampung.
- Mustikasari, Dhermawati Putri. (2013). Faktor-faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan Kabupaten Batang. *Accounting Analysis Journal*.
- Najahningrum, Anik Fatun, Sukardi Ikhsan, dan Maylia Pramono Sari. (2013). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi kecenderungan kecurangan (fraud): persepsi pegawai dinas Provinsi DIY*. *Skripsi*. Simposium Nasional Akuntansi XVI Manado.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah*.
- Pramudita, Aditya. (2013). *Faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan (persepsi pegawai pada dinas se-kota Salatiga)*. *Skripsi*. Universitas Negeri Semarang.
- Pristiyanti, Ika Ruli. (2012). Persepsi pegawai instansi pemerintah mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi fraud di sektor pemerintahan. *Accounting Analysis Journal*. Universitas Negeri Semarang.
- Priyanto, D. (2010). *Paham analisis data statistik*. Yogyakarta: MedikaKom.
- Sukanto, E. (2009). Perbandingan persepsi auditor internal, akuntan publik dan auditor pemerintah terhadap penugasan fraud audit dan profil fraud auditor. *Fokus Ekonomi*, 4(1), 13-26.
- Sulistyowati, Firma. (2007). Pengaruh kepuasan gaji dan kultur organisasi terhadap persepsi aparatur pemerintah daerah tentang tindak korupsi. *JAAI*, 11(1), 47-66.
- Tim Tempo. (2012). *Korupsi 10 PNS Banyuwangi Dipe-cat*. <https://nasioanl.tempo.co/read/402690/korupsi-10-pns-banyuwangi-dipe-cat>. [Diakses pada 22 September 2017].
- Zulkarnain, Rifqi Mirza. (2013). Faktor-Faktor yang mempengaruhi terjadinya fraud di sektor pemerintahan (studi kasus pada dinas Se-Kota Surakarta). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.